

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan jumlah penduduk di Indonesia pada saat ini menunjukkan sisi kualitas penduduk yang belum baik (Yuhan dan Indraswari, 2017:1). Seperti yang dilansir dari kompasiana (11/Desember/2017), di Negara berkembang seperti Indonesia pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi menghasilkan kualitas penduduk yang rendah karena pemerintah belum bisa menangani permasalahan kependudukan sepenuhnya. Kualitas penduduk Indonesia berdasarkan Human Development Index 2019 menduduki urutan 111 dari 187 Negara yang ada di dunia. Banyak faktor yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah, di antaranya:

1. Masalah Pendidikan. Saat ini tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong relatif rendah karena mayoritas penduduk Indonesia hanya mengenyam pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan masih banyak pula masyarakat Indonesia yang hanya lulus dengan ijazah Sekolah Dasar (SD). Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah pada agustus 2020 tercatat 49,96 juta atau 38,89% dari jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia 128,45 juta orang. Pada posisi kedua ada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tercatat sebanyak 24,34 juta orang atau 18,95% dari total angkatan kerja, kemudian disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tercatat 23,47 juta orang atau 18,27% dari jumlah penduduk bekerja.
2. Masalah Kesehatan. Kesehatan penduduk juga dijadikan suatu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat kesehatan penduduk Indonesia maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Indikator tingkat kesehatan antara lain: angka kematian bayi, angka kematian ibu saat melahirkan,

dan angka kecukupan gizi makanan. Di Indonesia, angka kematian ibu dari data tahun 2015 dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) masih cukup tinggi dengan 305 per 100.000 penduduk dan angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil survey status gizi balita Indonesia tahun 2019, angka stunting di Tanah Air masih cukup tinggi yakni sebesar 27,6%. Artinya, dari 10 orang balita, 3 di antaranya stunting.

3. Pendapatan Perkapita. Pendapatan perkapita dijadikan tolak ukur untuk mengukur kemakmuran suatu Negara. Pendapatan perkapita Negara Indonesia masih tergolong rendah, data tahun 2016 menyebutkan pendapatan perkapita Indonesia mencapai 112,20 dollar atau jika dirupiahkan setara dengan Rp1.630.153,/bulan. Pendapatan tersebut diperoleh dari kurs \$112,20xRp14.529 (berdasarkan kurs per 03 November 2020). Keadaan ini menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia tergolong miskin atau belum sejahtera karena penghasilan rendah.

Selain itu kondisi kualitas penduduk juga ditunjukkan dengan kondisi kurang serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung lingkungan. Pada level regional misalnya pertambahan penduduk secara berlebihan di kota terutama yang berasal dari urbanisasi menyebabkan daya dukung dan daya tampung kota menjadi semakin menurun, salah satunya adalah berkurangnya lahan untuk permukiman. Akibat dari kurangnya lahan untuk permukiman maka dibutuhkan penambahan ruang dan lahan. Penambahan ruang dan lahan yang tidak memungkinkan lagi di dalam kota menyebabkan terjadinya pelebaran luas ke arah pinggir Kota/belakang Kota.

Permasalahan tersebut selanjutnya dapat mempengaruhi segala sendi pembangunan kehidupan yang akan dilaksanakan pemerintah di dalam lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai penelitian Eny Rochaida (2016:14) yakni permasalahan yang muncul di bidang kependudukan bukan hanya pada jumlah yang besar semata akan tetapi juga berimbas pada persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk yang sebagian besar masih muda, modal dan

teknologi yang dimiliki juga masih rendah dan akibatnya produktivitas kerja makin menurun serta masalah krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan adalah dengan pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) yang saat ini menjadi prioritas pemerintah, di mana dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun, Desa atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (Pedoman Pelaksanaan Kampung KB, 2016). Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui seluruh program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti program tersebut kemudian dikeluarkanlah surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Januari 2016 Nomor: 440/70SJ tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di tiap-tiap Kabupaten/Kota serta surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) Tanggal 11 Januari 2016 Nomor: 007/RC.300/B.1/2016 tentang Pembentukan dan Pencanaan Kampung KB.

Dalam sebuah program tentunya sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar agar program tersebut dapat dikatakan berhasil atau berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Partisipasi dari masyarakat juga dapat menunjukkan bagaimana suatu program dapat diterima atau tidaknya oleh masyarakat sekitar. Partisipasi sendiri menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan program Kampung KB tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi. Kampung KB sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan program-program pembangunan lainnya yang telah disesuaikan dengan wilayah masing-masing.

Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat. Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya

Keberhasilan kampung KB tersebut terlihat di Dusun Batu Nisung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, NTB. Jumlah warga pra sejahtera di kampung tersebut awalnya berjumlah 95 Kepala Keluarga (KK), namun setelah pelaksanaan program kampung KB berkurang menjadi 37 kepala keluarga (KK) atau menurun sebesar 65% (persen). Partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung keberhasilan program kampung KB tersebut dapat juga dilihat pada keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan baik terkait pendidikan, keluarga berencana, kesehatan maupun aspek ekonomi.

Pemerintah Kota Kupang telah membentuk kampung KB yang menyebar di tujuh kelurahan di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2016. Tujuh Kampung KB yang telah terbentuk di Kota Kupang, yaitu di Kelurahan Lasiana, Naimata, Manutapen, Oebufu, Naikoten 1, Pasir Panjang, dan Kelurahan Alak. Kriteria Kampung KB yaitu peserta KB yang aktif di kampung tersebut tergolong rendah dan penggunaan kontrasepsi jangka panjang lebih rendah. Sasaran Kampung KB adalah keluarga karena keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat, serta remaja, anak-anak dan pasangan usia subur (PUS).

Penduduk Kota Kupang tahun 2019 sebanyak 402.286 jiwa yang terdiri dari 206.129 jiwa penduduk laki-laki dan 196.157 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kota Kupang mencapai 2.231 jiwa/km² dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Kota Lama dengan kepadatan mencapai 10.632 jiwa/km² dan Kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Alak sebesar 714 jiwa/km². Berdasarkan komposisi penduduknya, Kota Kupang didominasi oleh penduduk usia produktif yang mencapai 70,54% dari jumlah penduduk.

Upaya mensejahterahkan keluarga melalui kampung KB, wakil walikota kupang Dr. Hermanus Man meresmikan Kampung KB Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sungkaen merupakan salah satu kampung tua Suku Timor yang berada dalam wilayah Kelurahan Naimata, yang masih kental dengan Budaya Timor, ditetapkan sebagai salah satu lokasi sasaran program Kampung KB. Di Kampung Sungkaen yang menjadi wilayah Kampung KB di Naimata sudah berjalan sejak tahun 2017. Jumlah penduduk Kampung KB Sungkaen berjumlah 1.050 orang, dengan jumlah laki-laki 536 orang dan perempuan sebanyak 494 orang. Adapun penanggungjawab ialah Lurah Naimata dan pengurus dibagi dalam 8 seksi yakni seksi keagamaan, seksi sosDik, seksi reproduksi, seksi ekonomi, seksi perlindungan, seksi kasih sayang, seksi budaya, dan seksi pembinaan lingkungan.

Kampung Keluarga Berencana direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan pada Kampung Keluarga Berencana. Program Kampung KB merupakan salah satu kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Partisipasi masyarakat Kampung Sungkaen dalam Kampung KB adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya (BKKBN 2015). Partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB adalah kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada di Kampung KB, mulai dari mengikuti sosialisasi KB, konsultasi perkembangan anak, serta konsultasi kesehatan lansia, dan lain sebagainya.

Dari hasil penelusuran peneliti, didapatkan fakta bahwa partisipasi masyarakat Kampung KB Sungkaen cukup baik terhadap program-program yang diadakan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Partisipasi Masyarakat**

Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Sungkaen Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada program Kampung KB di Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB di Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam evaluasi program Kampung KB di Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada program Kampung KB di Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB di Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam evaluasi program Kampung KB di Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi ilmiah mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB di Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
2. Manfaat praktis yang diperoleh adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan instansi terkait maupun *stakeholder* lainnya terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kampung KB.